

**Sekolah Gratis, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Problematikanya.****Aninda nurul aulia**

Universitas wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang

[Email:anindanurulaulia717@gmail.com](mailto:anindanurulaulia717@gmail.com)**Ifada Retno Ekaningrum, M.Ag**

Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang

Email: [ifadaretnoekaningrum@unwahas.ac.id](mailto:ifadaretnoekaningrum@unwahas.ac.id)**Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag.**

Universitas Islam Negeri Walisingo Semarang

[Email.fsyukur@walisongo.ac.id](mailto:fsyukur@walisongo.ac.id)

*Abstract: Education is a human endeavor to develop the physical and spiritual potential within a society and culture, organized through experience, enhanced by good habits that provide valuable experiences that can be used to achieve predetermined goals. This study employed a qualitative method with a library research approach and a descriptive model from Bogdan and Taylor. Data were obtained from academic literature, including books, journals, and scientific articles. The results indicate that since the launch of the School Operational Assistance (BOS) program in July 2005, the primary goal was to accelerate the achievement of the 9-year compulsory education program. In 2009, the primary goal was to focus on improving quality, relevance, competitiveness, governance, accountability, and public image. The BOS program has proven to be an important and effective instrument in supporting the implementation of free schools in Indonesia by financing school operations, waiving tuition fees for students, and expanding access to quality education. Although the government is striving for free education, the reality in many regions still shows a number of problems. One of these is insufficient funding.*

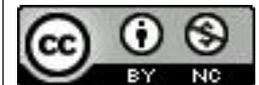
**Keywords:** Education policy, School Operational Assistance (BOS), quality of education

**Article History**

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No  
234Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/Sindoro.v1i2.365**Copyright : Author**  
**Publish by : Sindoro**

This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstrak: Pendidikan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk mengembangkan potensi jasmani maupun rohani yang ada dalam Masyarakat dan kebudayaan yang terorganisasi dengan pengalaman yang disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat menganugrahkan pengalaman yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan model deskriptif dari Bogdan dan Taylor. Data diperoleh dari literatur akademik, termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Hasilnya menunjukkan bahwa Semenjak diluncurkan program BOS pada Juli 2005, tujuan utama yang ingin dicapai adalah percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun, sedangkan pada tahun 2009 ini, tujuan utamanya lebih ditekankan kepada peningkatan mutu, relevansi, daya saing dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Program BOS terbukti menjadi instrument penting dan efektif dalam mendukung pelaksanaan sekolah gratis di Indonesia dengan membiayai operasional sekolah, membebaskan biaya pendidikan bagi siswa, dan memperluas akses pendidikan berkualitas. Meskipun pemerintah mengupayakan pendidikan gratis, kenyataan yang ada di banyak daerah masih menunjukkan adanya sejumlah masalah. Salah satunya adalah pembiayaan yang tidak sepenuhnya tercukupi.

**Kata kunci:** *kebijakan Pendidikan, Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), kualitas Pendidikan.*

## **Pendahuluan**

Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah terbatasnya akses pendidikan terutama untuk masyarakat miskin. Masih banyak anak-anak bangsa yang masih berusia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. Keadaan tersebut tentu harus

di perbaiki agar hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dapat terpenuhi sekaligus untuk pencapaian sasaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintah melalui Departemen pendidikan Nasional mencanangkan kebijakan dana BOS sebagai pendamping dari program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah (Regina dkk., t.t.).

Menurut hery noer (2000 :197) yang berpendapat bahwa sekolah merupakan satu satunya pusat pendidikan karena sekolah merupakan lembaga negara yang secara khusus bertanggung jawab atas proses pembelajaran dan pendidikan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa banyak pusat pendidikan seperti keluarga, tetangga, kampung halaman, lingkungan rumah tangga, sekolah, masjid, tempat pertemuan, media masa (seperti koran, radio dan televisi) dan lain-lain, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pendidikan dan pembentukan kepribadian individu. Namun, masyarakat tetap memandang sekolah sebagai satu-satunya sarana pendidikan yang sangat efektif untuk mencapai pendidikan.

M. Izza ahsin (2007:30) berasumsi bahwa orang yang tidak bersekolah maka ia tidak berpendidikan. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan itu sendiri? Pendidikan merupakan kegiatan yang mengembangkan seluruh aspek kepribadian seseorang dan berlangsung terus sepanjang hayat. Oleh karena itu seseorang tidak boleh mengenyam pendidikan hanya melalui sekolah.

### **Rumusan masalah dan tujuan penelitian**

Penelitian ini hendak menjawab tiga rumusan masalah utama, yaitu : (1) Bagaimana konsep dasar dan Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis Di Indonesia? (2) Apa Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Mendukung Pelaksanaan Sekolah Gratis? (3) Apa Saja Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Sekolah Gratis Dan Program BOS?

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis Di Indonesia.(2) Untuk Mengeksplor Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Mendukung Pelaksanaan Sekolah Gratis. (3) Untuk Menganalisis Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Sekolah Gratis Dan Program BOS.

**Metode penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang diorientasikan untuk memahami dunia makna subjek penelitian secara mendalam dan pembentukan teori substantif berdasar pada konsep-konsep yang muncul dari data empiris (Noeng Muhadjir:2000). Dengan mengacu model penelitian diskriptif kualitatif Bogdan dan Taylor, penelitian ini bermaksud menghasilkan data deskriptif berupa narasi-narasi tertulis yang sesuai dengan topik studi yang bersumber dari berbagai literatur, baik itu dalam bentuk bukubuku, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus yang dikaji (Lexy : 2011). Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification) (Sugiyono :2013).

**Pembahasan****Konsep dasar sekolah gratis**

Kata gratis pada “Pendidikan Gratis”, secara bahasa merujuk kepada makna tidak dipungut bayaran atau cuma-cuma. menurut Hasriyani Latif Kata gratis memiliki daya tarik tersendiri jika digandengkan dengan sesuatu yang bernilai, misalnya, minyak goreng gratis kata pendidikan jika digandengkan dengan kata gratis. Pendidikan gratis dapat meningkatkan animo masyarakat untuk masuk atau melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi Implementasi kebijakan sekolah gratis di Indonesia. (Hasriyani Latif:2022).

Menurut Ema dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pendidikan gratis masih terus berkembang di masyarakat dengan pemahaman masing-masing. Antara pemerintah sebagai pemangku dan pelaksana kebijakan dengan masyarakat tidak memiliki satu pemahaman yang sama. Kontroversi pun masih terus berkembang walaupun berbagai sosialisasi terus dilakukan. (Ema:2010).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam rangka mewujudkan amanah agung, cita-cita mulia ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ sebagaimana yang dimuat dalam preambule UUD 1945, Pemerintah menetapkan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 (2) UUD 1945 hasil Amandemen. 12 Selanjutnya Undang-Undang Sisdiknas Pasal 34 (2) menegaskan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah

menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pendidikan tanpa biaya atau yang disebut Pendidikan Gratis adalah Pendidikan yang membebaskan siswa dari segala pungutan biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan pendidikan tersebut, baik pada aspek input, proses, maupun keluarannya. Jika ditelusur pada landasan formal pendidikan di Indonesia, nomenklatur “Pendidikan gratis” sesungguhnya tidak ditemukan dalam tatanan perundang-undangan. Namun, memahami definisi pendidikan gratis dalam konteks pembebasan biaya pendidikan bagi siswa oleh penyelenggara pendidikan, dalam hal ini pemerintah hadir membiayainya, terdapat beberapa program yang dapat dirujuk untuk makna pendidikan gratis, yaitu Program Wajib Belajar, dan Program Indonesia Pintar (PIP) ( Rusman Roni:2009).

Penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan pengembangan, pengawasan, serta pengendalian program pendidikan gratis (Husaini Usman:2005). Implementasi pendidikan gratis yang dilaksanakan pada sekolah juga mencakup unsur: perencanaan (plaining), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling), dan penilaian (evaluating) agar diketahui sejauhmana ketercapaian program pendidikan gratis itu sendiri.

Pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas pendidikan. Meskipun pembiayaan pendidikan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi, maka pendidikan yang berkualitas hanya dalam angan-angan (Mulyono, 2010: 5). Pengertian dari pembiayaan pendidikan adalah yang diutarakan Fatah (2000: 112) bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

### **Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis Di Indonesia**

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rumusan pendidikan menurut Undang-undang tersebut mengandung makna yang dalam dan luas, yang terkait dengan sumber daya manusia, sehingga perlu penanganan yang serius, cermat, komprehensif, strategis dan bertanggungjawab. Untuk itu, diperlukan anggaran/biaya yang tidak sedikit, perencanaan yang matang, serta pertanggungjawaban yang transparan (Irianto, 2011: 3).

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (target group), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (unintended/negative effects). Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Dalam bidang pendidikan, menurut Grindle, 1984 (Rawita, 2010: 120) implementasi kebijakan pendidikan sesungguhnya bukanlah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, melainkan lebih dari itu. Implementasi kebijakan pendidikan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan pendidikan tersebut. Lebih lanjut, Rawita (2010: 123) mengemukakan secara praktikal, implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis yang dicirikan oleh adanya intervensi berbagai kepentingan dan tekanan. Kerumitan implementasi kebijakan pendidikan tersebut tercermin dari pandangan Bardach (1991), yang menyatakan bahwa adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas.

Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang enak didengar oleh para pemimpin dan para pemilih (konstituen).

Subarsono (2015:89) mengungkapkan keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jones dalam Pioh dan Londa (2016: 77) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses mendapatkan sumberdaya tambahan, sehingga dapat diperhitungkan apa yang harus dikerjakan. Agar dapat terimplementasi dengan baik apa yang menjadi tujuannya seperti yang telah dirumuskan maka kebijakan publik perlu dipersiapkan dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan itu dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, yang oleh Charles O. Jones dalam Pioh dan Londa (2016: 77) mengemukakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam implementasi kebijakan yaitu : 1). Organization; 2). Interpretation; 3). Application.

Daniel A. Mazmanian (Wahab, 1997) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (target group), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (unintended/negative effects). Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Salah satu faktor yang cukup memberikan pengaruh terhadap mutu dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Persoalan anggaran pendidikan ini menyangkut besarnya anggaran dan alokasi anggaran. Besarnya anggaran pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih tergolong sangat kecil, bahkan dari beberapa sumber anggaran di Indonesia merupakan yang terkecil di Negara-negara ASEAN (Hasbullah, 2010: 45).

Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, bahkan warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan setiap warga Negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar serta orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan kepada anaknya (Ali Ridho : 86).

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembangunan dalam suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Komitmen pendidikan bangsa Indonesia, ditegaskan dalam konstitusi UUD'45 Pasal 31, untuk menjamin hak mendapatkan pendidikan tiap warganya. Landasan konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan kedalam kebijakan pemerintah, salah satunya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan tahun 2005. Program BOS bertujuan untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi tiap lapisan masyarakat Indonesia, guna mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (Romadhotin dkk., 2024).

### **Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).**

Kebijakan Pemerintah berupa pendidikan gratis melalui progam BOS yang diselenggarakan pada tahun 2009 memiliki perbedaan tujuan bila dibandingkan program BOS tahun-tahun sebelumnya. Semenjak diluncurkan program BOS pada Juli 2005, tujuan utama yang ingin dicapai adalah percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun, sedangkan pada tahun 2009 ini, tujuan utamanya lebih ditekankan kepada peningkatan mutu, relevansi, daya saing dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Kebijakan pendidikan gratis melalui program BOS telah mendorong minat masyarakat untuk berperan aktif mengikuti pendidikan dari jenjang SD hingga SMP (Supriyadi, t.t.). Implementasi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dampak bagi setiap warga Negara yang berusia 7-12 tahun wajib mengikuti Pendidikan

Dasar dan masyarakat yang tidak mampu digratiskan tanpa pungutan biaya sampai mencapai usia wajib belajar 9 tahun (Rolos dkk., t.t.)

Wikipedia menyebutkan pendidikan gratis sebagai pendidikan yang diberikan kepada siswa tanpa pungutan biaya. Akan tetapi, siswa mungkin tetap mempunyai pengeluaran untuk mendapatkan pendidikan gratis, seperti buku dan bahan ajar lain. Pendidikan gratis dapat pula diberikan kepada siswa dalam bentuk beasiswa atau hibah yang menutup semua atau hampir semua pengeluaran siswa untuk dapat mengikuti kegiatan sekolah. Ini berarti bahwa orang tua tidak perlu membayar iuran sekolah agar anaknya belajar di sekolah. Selain itu, orangtua tidak perlu membayar berbagai pengeluaran lain yang membuat anak-anak miskin tidak bersekolah. Pengeluaran tersebut antara lain membeli buku teks, biaya partisipasi dalam kegiatan olahraga, dan lain-lain (Ghozali, 2012: 2). Beberapa hasil penelitian berikut, peneliti paparkan untuk mengonfirmasi pertanyaan banyak kalangan yang menyebutkan apakah pendidikan gratis dapat mempertahankan mutu pendidikannya.

Pertama, hasil penelitian Asep Ediana Latip dan Nafia Wafiqni yang dipublikasi pada tahun 2017 silam yang menganalisis mutu implementasi pendidikan gratis di Jabodetabek.<sup>36</sup> Mereka menyebutkan bahwa implementasi pendidikan gratis di Jabodetabek telah memenuhi standar mutu pendidikan baik dilihat dari input, proses, output, dan outcome pendidikan. Dilihat dari standar mutu pendidikan berbasis akreditasi, mutu pendidikan gratis di Jabodetabek memenuhi standar mutu Pendidikan dengan perolehan nilai A. Model implementasi pendidikan gratis dari pendanaannya tergambar dalam tiga model pendidikan yaitu pembebasan segala jenis pungutan oleh sekolah terhadap orang tua, Pembebasan biaya operasional pendidikan terhadap orang tua kecuali biaya untuk kebutuhan pribadi seperti seragam sekolah dan pembiayaan operasional pendidikan dibebankan pada dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Dampak implementasi pendidikan gratis berdasarkan pada mutu input, proses, output, dan outcome, serta mutu akreditasi juga model implementasi pendidikan gratis bagi orang tua, implementasi pendidikan gratis di Jabodetabek dengan standar mutunya tetap memiliki partisipasi dari masyarakat, memiliki kepuasan atas lulusannya, dan terbantu dari pembiayaan pendidikan secara gratis. Bagi guru berdasarkan pada perolehan data tentang mutu pendidikan gratis, guru melaksanakan pembelajaran

belum memenuhi standar proses pembelajaran dengan optimal.

Kedua, hasil penelitian Muzakkir tahun 2017 tentang persepsi siswa tentang penerapan pendidikan gratis hubungannya dengan mutu pendidikan siswa SMAN 1 Woja Kabupaten Dompu. Temuan Muzakkir menyebutkan bahwa penerapan Pendidikan gratis ada hubungannya dengan mutu pendidikan atau hasil belajar siswa, maksudnya dalam hal ini program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah daerah kabupaten dompu tidak berpengaruh terhadap menurunnya kualitas atau hasil belajar siswa SMA, namun sebaliknya dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang dilihat dari nilai siswa yang memenuhi KKM 80% dari jumlah siswa yang menjadi sampel penelitian yaitu 95 siswa. Selain hasil analisis perhitungan ketuntasan hasil belajar siswa, juga respon siswa terhadap penerapan pendidikan gratis begitu antusias, Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket (kuisioiner) bahwa 64 siswa (42 + 22) atau 67% siswa menjawab setuju dan sangat setuju. Artinya sebagian besar atau mayoritas siswa SMA Kelas XI setuju dengan penyelenggaraan pendidikan gratis.<sup>38</sup> Selain itu untuk memperkuat pernyataan tersebut, kemudian data interval tersebut juga dapat dianalisis dengan menghitung jumlah skor jawaban berdasarkan skoring dari setiap jawaban siswa. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah skor ideal (Skor Tertinggi) =  $5 \times 95 = 475$  (semua jawaban SS). Berdasarkan data tersebut maka tingkat respon siswa (SS) terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis =  $(335:475) \times 100\% = 70.5\%$  dari sebenarnya yang diharapkan (100%) sehingga dapat disimpulkan sebagian besar atau mayoritas siswa setuju dan sangat setuju dengan penerapan pendidikan gratis. Didamping itu, jika dilihat dari perhitungan korelasi yang ditinjau dari nilai Ftabel dan nilai Fhitung bahwa dapat disimpulkan Fhitung > Ftabel artinya ada hubungan penerapan pendidikan gratis dengan mutu pendidikan atau hasil belajar, maka dalam hal ini penerapan pendidikan gratis tidak berdampak pada menurunnya hasil belajar siswa, karena mayoritas atau sebagian besar hasil belajar siswa diatas rata-rata atau memenuhi KKM.<sup>39</sup>

Ketiga, Nita Andriani dan Sujianto tahun 2014 tentang Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Siak yang menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Siak masih belum berjalan dengan baik. Artinya dalam proses implementasinya masih ada hal-hal yang belum terpenuhi, seperti penerapan isi kebijakan, pengaruh

lingkungan implementasi dan pencapaian hasil kebijakan. Dalam penerapan isi kebijakan implementasinya belum maksimal karena masih ada kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Kemudian apabila dilihat dari pengaruh lingkungan implementasi masih terlihat rendahnya kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan dalam implementasinya. Selanjutnya apabila dilihat dari pencapaian hasil kebijakan yang belum sesuai juga dikarenakan oleh rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat.<sup>40</sup>

Keempat, Luthfi Zulkarmain tahun 2020 tentang analisis mutu input, proses, output MTs Assalam Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Temuan penelitian Zulkamain menyebutkan bahwa MTs Assalam meskipun di usianya yang masih belia (baru beroperasi mulai 2017) telah dilaksanakan pengelolaan sesuai standar pengelolaa pada aspek input, proses dan outputnya. Input tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan eksklusif dan inklusif. Berdasarkan hasil-hasil temuan penelitian di atas, terlihat dengan jelas, bahwa hanya penelitian Andriani & Sujianto tahun 2014 yang menyatakan penyelenggaraan pendidikan gratis belum berjalan dengan baik. Tetapi 3 hasil penelitian terbaru menunjukkan hasil terbalik. Pelaksanaan pendidikan gratis telah diimplementasikan secara baik dan memenuhi standar nasional pendidik, dan juga tuntutan akreditasi.

### **Problematika kebijakan sekolah gratis**

Sekolah sebagai pihak pengelola langsung dana pendidikan, selama ini hanya memiliki dan memberikan laporan dan surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan. Menurut Bastian (2007), sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, serta perhitungan kebutuhan biaya pendidikan per siswa. Namun, kenyataan di lapangan masih ditemukan adanya hal berikut:

1. Pada proses pengambilan kebijakan strategis pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah belum melibatkan stakeholders, sehingga masih ada pengalokasian anggaran yang tidak mencerminkan prioritas, sifat dan kebutuhan siswa.
2. Makin mahalnya pungutan sekolah sehingga akses orang miskin untuk memperoleh pendidikan menengah yang baik semakin terbatas.

3. Terbatasnya akses komite sekolah terhadap sumber dana yang diperoleh sekolah.
4. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan sekolah belum maksimal untuk bahan pengambilan keputusan entitas sekolah.
5. Kuatnya dominasi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, menyebabkan rendahnya mempertanggungjawabkan keungan dan melemahkan fungsi pengawasan melalui komite sekolah, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan
6. kewenangan dalam pengelolaan keuangan.

Pada perspektif akuntansi, kepala sekolah wajib menyampaikan laporan keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah kepada orang tua murid yang diwakili dengan keberadaan komite sekolah serta kepada pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi keuangan diberlakukan sebagai kriteria pelaporan yang disajikan bagi pihak pengelola sekolah. Hal ini akan menjamin akuntabilitas publik, khususnya bagi pengguna jasa pendidikan (Bastian 2007:29).

Menurut pendapat Febri (Peneliti senior ICW) yang dilansir melalui media republika on line tanggal 8 Agustus 2014 penyimpangan dana BOS di tingkat sekolah, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga atas pengelolaannya. Sebagai contoh, kewajiban mengumumkan APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman sekolah ternyata tidak diikuti oleh sebagian besar sekolah.

Penyebab mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara signifikan adalah: (1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional selama ini menggunakan pendekatan education production function, yang hanya memusatkan pada masukan (input) keluaran (output), kurang memperhatikan proses. Lembaga pendidikan seolah berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua masukan yang diperlukan dalam kegiatan produksi, maka akan menghasilkan output yang dikehendaki, sementara proses pendidikan yang sangat menentukan keluaran kurang mendapat perhatian, (2) penyelenggaraan pendidikan nasional selama ini dilakukan secara birokrasi-sentralistik. Sekolah lebih sebagai subordinasi dari birokrasi di atasnya, sehingga sekolah kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas atau inisiatif untuk mengembangkan dan

memajukan lembaganya, dan (3) peran serta warga sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua murid

dalam penyeleng-garaan pendidikan selama ini masih sangat kecil. Partisipasi masyarakat pada umumnya masih lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses Pendidikan (Dewi dkk., 2015).

Meskipun pemerintah mengupayakan pendidikan gratis, kenyataan yang ada di banyak daerah masih menunjukkan adanya sejumlah masalah. Salah satunya adalah pembiayaan yang tidak sepenuhnya tercukupi. Beberapa sekolah yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah masih terpaksa meminta sumbangan sukarela dari orang tua murid untuk menutupi biaya operasional mereka. Hal ini menimbulkan ketimpangan karena sekolah di daerah tertentu bisa lebih kaya dan memiliki fasilitas yang lebih baik, sementara di daerah lain masih kekurangan dana.

Selain itu, adanya biaya tersembunyi juga menjadi masalah dalam pelaksanaan sekolah gratis. Banyak orang tua merasa terbebani meskipun secara resmi sekolah tersebut mengklaim sebagai sekolah gratis. Bahkan, beberapa orang tua menganggap bahwa biaya- biaya tersebut pada akhirnya tetap menghalangi akses pendidikan bagi anak-anak mereka.

### **Kesimpulan**

Kebijakan Pemerintah berupa pendidikan gratis melalui progam BOS yang diselenggarakan pada tahun 2009 memiliki perbedaan tujuan bila dibandingkan program BOS tahun-tahun sebelumnya. Semenjak diluncurkan program BOS pada Juli 2005, tujuan utama yang ingin dicapai adalah percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun, sedangkan pada tahun 2009 ini, tujuan utamanya lebih ditekankan kepada peningkatan mutu, relevansi, daya saing dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Kebijakan pendidikan gratis melalui program BOS telah mendorong minat masyarakat untuk berperan aktif mengikuti pendidikan dari jenjang SD hingga SMP.

Program BOS terbukti menjadi instrumen penting dan efektif dalam mendukung pelaksanaan sekolah gratis di Indonesia dengan membiayai operasional sekolah, membebaskan biaya pendidikan bagi siswa, dan memperluas akses pendidikan berkualitas. Namun, efektivitasnya terus ditingkatkan melalui pengawasan yang ketat, peningkatan alokasi dana, serta penyesuaian kebijakan

untuk mengatasi tantangan di lapangan

Meskipun pemerintah mengupayakan pendidikan gratis, kenyataan yang ada di banyak daerah masih menunjukkan adanya sejumlah masalah. Salah satunya adalah pembiayaan yang tidak sepenuhnya tercukupi. Beberapa sekolah yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah masih terpaksa meminta sumbangan sukarela dari orang tua murid untuk menutupi biaya operasional mereka. Hal ini menimbulkan ketimpangan karena sekolah di daerah tertentu bisa lebih kaya dan memiliki fasilitas yang lebih baik, sementara di daerah lain masih kekurangan dana.

#### Daftar Pustaka

- Ahsin, M. Izza, (2007). *Dunia Tanpa Sekolah*, Cet. I; Bandung: Read.
- Aly, Hery Noer, Munzier S. (2000), *Watak Pendidikan Islam* Jakarta: Friska Agung Insani.
- Andriani, Nita, and Sujianto '. "Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis." *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 3 (September 4, 2014): 23-30. <https://doi.org/10.46730/jkp.5.3.p.23-30>.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Erlangga: Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Buku 1. Konsep Dasar. Jakarta: Depdiknas.
- Dewi, A. K. R., Yudana, I. M., & Agung, A. A. G. (2015). Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Smp Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng. 6(1).
- Ema. "Definisi Sekolah Gratis Perlu Diluruskan." *Sripoku.com*, February 10, 2010. <https://palembang.tribunnews.com/02/08/2010/definisi-sekolah-gratis-perludiluruskan>.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Accessed June 11, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun2003>.
- Fattah, Nanang. (2001). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Ghozali, Abbas. (2012). Biaya Satuan Dasar dan Kebutuhan Dana Untuk Pendidikan Dasar Gratis. *Cakrawala Pendidikan*, XXXI (1):1- 22.
- Hasbullah. (2010). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan*

Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press.

Irianto, Agus. (2011). Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan suatu Bangsa. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Londa, V.Y. 2016. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan (Studi di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 3, Hal. 1-8. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9224/6510>. Diakses 0609-2021

Latif, Hasriyani. "Buruan! Ada Promo Minyak Goreng Gratis di Indomaret Hari Ini Kamis 20 Januari 2022, Simak Cara Dapat." *Tribun-timur.com*, February 20, 2022. <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/20/buruan-ada-promo-minyakgoreng-gratis-di-indomaret-hari-ini-kamis-20-januari-2022-simak-cara-dapat>.

Latip, Asep Ediana, and Nafia Wafiqni. "Analisis Mutu Implementasi Pendidikan Gratis Di Jabodetabek." *Jmie (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education)* 1, no. 1 (May 31, 2017). <https://doi.org/10.32934/jmie.v1i1.27>.

Moleong, Lexy J , (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya).

Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Jogjakarta : Ar-Ruz Media Group.

Muzakkir, Muzakkir. "Persepsi Siswa Tentang Penerapan Pendidikan Gratis Hubungannya Dengan Mutu Pendidikan Siswa Sman 1 Woja Kabupaten Dompu." *Jurnal Teknologi Pendidikan: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembelajaran* 2, no. 2 (October 10, 2017): 68-75. <https://doi.org/10.33394/jtp.v2i2.595>.

Noeng Muhadjir, (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV (Yogyakarta: Rake Sarasin).

Rakhmawati, I. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4078>.

Rawita, Sutisno, Ino. (2010). *Kebijakan Pendidikan : Teori, Implementasi dan monev*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.

Regina, B., Soeaidy, S., & Ribawanto, H. (T.T.). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang). Dewi, A. K. R., Yudana, I. M., & Agung, A. A. G. (2015). Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Smp Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng. 6(1).

Rakhmawati, I. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 1(1), 95. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4078>.

Regina, B., Soeaidy, S., & Ribawanto, H. (t.t.). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang).

Rolos, M. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (t.t.). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara. 113.

Romadhotin, P. A., Trihantoyo, S., & Santoso, G. (2024). Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tuban. 03(02).

Shofiyati, A. & Shaleh. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. Tadbir Muwahhid, 8(1). <https://doi.org/10.30997/jtm.v8i1.8973>

Roni, Rusman. "Pendidikan Gratis Berbasis 5 Pilar Manajemen Mutu Terpadu." Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan 3, no. 2 (2009). <http://www.ejournal.sumselprov.go.id/pptk/article/view/173>.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 22, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Supriyadi, U. D. (t.t.). Pelaksanaan Bos Dan Minat Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar Gratis.

Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Wahab, Abdul. (1997). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi. *Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.